

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan transparansi informasi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah, sebagai pengelola dana publik, dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berisi landasan standar akuntansi berbasis akrual dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Penerapan basis akrual dalam SAP, berarti bahwa transaksi dan kejadian ekonomi harus diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat kejadian itu terjadi, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan

Namun, dalam praktiknya, banyak instansi pemerintah yang masih mengalami berbagai kendala dalam penerapan SAP berbasis akrual secara optimal. Hal ini menjadi fenomena penting, karena kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada sejauh mana standar akuntansi diterapkan dengan benar. Ketidaksiapan sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman teknis,

serta lemahnya pengendalian internal sering kali menjadi penghambat utama. Akibatnya, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari penerapan basis akrual.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian oleh Sujana *et al* (2023) menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian intern masing masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng. Selain itu, penelitian oleh Fransiskus (2024) menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual telah meningkatkan kualitas laporan keuangan, meskipun masih diperlukan peningkatan dan pemahaman dalam kompetensi sumber daya manusia. Studi lain, pada laporan keuangan Bappeda Kabupaten Bengkalis menemukan bahwa penerapan SAP membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta penyajian informasi keuangan yang lebih konsisten dan transparan (Afriyeni *et al.*,2024).

Kejaksaan Negeri Deli Serdang, sebagai salah satu instansi pemerintah di tingkat daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum sekaligus pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menganalisis sejauh mana penerapan akuntansi keuangan berbasis SAP telah dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi keuangan berbasis SAP di Kejaksaan Negeri Deli Serda serta mengevaluasi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dengan menggunakan indikator kualitas laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam SAP, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana penerapan SAP berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan di instansi tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penerapan akuntansi keuangan berbasis SAP di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, namun belm diketahui secara pasti bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Penting untuk mengetahui apakah penerapan SAP sesuai standar dapat meningkatkan relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman laporan keuangan.

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan proposal skripsi ini terarah maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh penerapan akuntansi keuangan berbasis SAP terhadap kualitas laporan keuangan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
2. Penelitian hanya menggunakan dua variabel, yaitu penerapan SAP (variabel independen) dan kualitas laporan keuangan (variabel dependen).
3. Data diperoleh dari pegawai yang terlibat dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan akuntansi keuangan berbasis SAP di Kejaksaan Negeri Deli Serdang
- 2) Bagaimana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan ditinjau dari aspek relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman.
- 3) Sejauh mana penerapan SAP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis penerapan akuntansi keuangan berbasis SAP di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
- 2) Untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang

- 3) Untuk mengetahui sejauh mana penerapan SAP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri menjadi dua bagian, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik serupa dengan pendekatan atau objek yang berbeda.
- 2) Menambah literatur akademik mengenai pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah.
- 3) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik terkait penerapan SAP berbasis akrual.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan gambaran kepada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengenai sejauh mana penerapan SAP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal yang diperkenalkan oleh Spence (1973) menjelaskan bahwa dalam situasi asimetri informasi, pihak yang memiliki informasi lebih (agen) akan memberikan sinyal kepada pihak lain yang kurang informasi (prinsipal) untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan. Dalam konteks sektor publik, pemerintah atau entitas pelaporan (sebagai agen) bertanggung jawab menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat, legislatif, dan pihak terkait lainnya (sebagai prinsipal), yang memiliki kepentingan atas pengelolaan dana publik.

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan salah satu bentuk sinyal positif yang dikirimkan oleh agen kepada prinsipal. Penerapan SAP menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah mengikuti pedoman dan standar akuntansi yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan, yang mencerminkan komitmen terhadap kualitas, akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas laporan keuangan, maka semakin kuat pula sinyal yang diberikan kepada para pemangku kepentingan bahwa instansi tersebut dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

Penelitian terdahulu yang mendukung penerapan teori sinyal dalam konteks laporan keuangan antara lain adalah studi oleh Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai SAP dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat tentang kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, penelitian oleh Sujana et al. (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang kemudian dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap instansi pemerintah. Fransiskus (2024) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik sebagai hasil penerapan SAP mampu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan SAP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai alat komunikasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan melalui penerapan SAP menjadi sinyal penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja dan tata kelola keuangan pemerintah.

2.1.2 Akuntansi Keuangan

a. Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan adalah dasar dari sistem informasi keuangan suatu perusahaan. Dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan, akuntansi keuangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

pengambilan keputusan yang terinformasi dan transparan tentang masalah ekonomi, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para pemangku kepentingan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai definisi akuntansi keuangan. Berikut beberapa diantaranya:

1) Kieso & Weygant (2000)

Akuntansi keuangan merupakan penyusunan laporan keuangan sebuah bisnis secara menyeluruh dan selanjutnya akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan dari pihak internal serta eksternal perusahaan.

2) Sugiarto (2002)

Menurut Sugiarto, Akuntansi keuangan menjadi salah satu bagian dari akuntansi yang fokus pada penyusunan laporan keuangan secara bertahap di perusahaan. Umumnya, laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemegang saham dan investor. Persamaan akuntansi yang diterapkan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu $Aset = Liabilitas + Ekuitas$.

3) Martini (2012)

Akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang diorientasikan untuk pihak eksternal perusahaan. Mengacu pada beragamnya tujuan dari setiap pihak eksternal membuat pihak manajemen perlu menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam pembuatan laporan keuangan.

b. Karakteristik Akuntansi Keuangan

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Ekuitas* oleh Rusmanto (2008), karakteristik akuntansi keuangan meliputi:

- 1) Dapat Dipahami (*Understandability*): Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan ekonomi dan akuntansi yang cukup untuk memahami informasi yang disajikan.
- 2) Relevansi (*Relevance*): Informasi dianggap relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan serta menegaskan atau merevisi hasil evaluasi mereka sebelumnya.
- 3) Keandalan (*Reability*): Informasi memiliki kualitas yang dapat diandalkan apabila pengguna dapat memercayai bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan atau bias material dan secara jujur menggambarkan apa yang seharusnya disajikan.
- 4) Dapat Diperbandingkan (*Comparability*): Informasi dalam laporan keuangan harus sebanding dengan laporan keuangan perusahaan yang sama pada periode sebelumnya dan dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan.

c. Tujuan Akuntansi Keuangan

Tujuan utama akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai posisi keuangan suatu entitas, kinerja,

dan perubahan kondisi keuangan. Informasi ini penting bagi mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

d. Komponen Akuntansi Keuangan

Akuntansi Keuangan terdiri dari beberapa elemen utama yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Komponennya adalah:

- 1) Neraca (*Balance Sheet*): Laporan ini menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset meliputi sumber daya yang dimiliki perusahaan, kewajiban mencakup utang atau kewajiban finansial, dan ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban serta mencerminkan nilai bersih perusahaan.
- 2) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*): Laporan ini menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan untuk periode waktu tertentu dan menghitung laba atau rugi bersihnya. Pendapatan meliputi semua penghasilan dari aktivitas operasional, sedangkan beban meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.
- 3) Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*): Laporan ini menunjukkan arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama periode waktu tertentu. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup transaksi yang memengaruhi laba bersih ,

arus kas dari aktivitas investasi mencakup pembelian dan penjualan aset tetap, dan arus kas dari aktivitas pendanaan mencakup transaksi yang memengaruhi modal dan utang jangka panjang.

- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*): Laporan ini menjelaskan perubahan modal selama periode tertentu, termasuk penambahan modal, pembagian dividen, dan laba atau rugi bersih yang dihasilkan. Hal ini membantu investor dan pemilik memahami bagaimana laba ditahan dan kontribusi pemilik memengaruhi posisi ekuitas perusahaan.
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes to the Financial Statement*): Catatan ini memberikan informasi tambahan dan penjelasan tentang item dalam laporan keuangan, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset dan liabilitas, dan informasi penting lainnya yang tidak dirinci dalam laporan keuangan utama. Catatan ini penting karena menyediakan konteks dan detail yang lebih besar kepada pengguna laporan keuangan (Nathan,2024).

2.1.3 Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintah

Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia telah melalui berbagai tahapan penting yang mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah gambaran kronologis perkembangan tersebut menurut Bahtiar Arif (2009):

a. Era Pra-Reformasi

Sebelum reformasi pengelolaan keuangan pemerintah ditandai dengan penerapan basis kas, pendekatan *single fund*, dan pencatatan transaksi keuangan dengan metode *single entry*. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi seperti UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.

b. Era Reformasi dan Otonomi Daerah.

Pada tanggal 1 Januari 2001, era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimulai di Indonesia. Perubahan ini memerlukan penyesuaian format anggaran dan pelaporan. Kementerian dalam negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002, yang mulai mengenalkan penggunaan akuntansi berbasis kas modifikasian (*modified cash basis*) serta pembukuan berpasangan (*double entry bookkeeping*) untuk pencatatan keuangan daerah.

c. Reformasi Keuangan Daerah.

Tahun 2003 dan 2004 merupakan tahun penting dengan disahkannya tiga undang-undang keuangan negara, yaitu:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang ini mendorong pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan lebih baik menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

d. Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2005, pemerintah membentuk KSAP melalui Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2004, yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2009. KSAP bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP ini menggunakan pendekatan *cash towards accrual* (CTA) dalam sistem pencatatan akuntansinya.

e. Penerapan SAP berbasis akrual.

Pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengadopsi akuntansi berbasis akrual. PP ini menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 dan mengharuskan entitas pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan basis akrual.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan kumpulan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP berperan sebagai pedoman bagi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang

berlaku. Berikut ini beberapa pengertian standar akuntansi pemerintah menurut para ahli:

Menurut Jusmani (2002), mendefinisikan SAP sebagai prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sedangkan menurut Mahsun (2018), menjelaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Hal senada dikatakan pula oleh Indra Bastian (2010), menjelaskan bahwa pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Abdul Halim (2016), mengartikan akuntansi pemerintahan sebagai proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak pihak eksternal pemerintah yang memerlukan.

Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, terdapat kerangka konseptual serta 12 PSAP. Berikut adalah lampiran yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, PSAP 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 03 mengenai Laporan Arus Kas, PSAP 04 yang membahas Catatan atas laporan

Keuangan (CaLK), PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP 06 mengenai Akuntansi Investasi, PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 mengenai Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 yang menjelaskan tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAP 12 yang berkaitan dengan Laporan Operasional. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terdiri dari lampiran yang menjeaskan ketentuan ketentuan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah. Lampiran kedua membahas mengenai standar akuntansi pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual, sedangkan lampiran ketiga menguraikan proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Berikut adalah perbedaan antara standar dalam Lampiran I dan Lampiran II pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

Tabel 2. 1 Perbedaan Lampiran I dan Lampiran II pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP

Aspek	Lampiran I (SAP	Lampiran II (SAP
-------	-----------------	------------------

	Berbasis Akruaal)	Berbasis Kas Menuju Akruaal
Basis Akuntansi	Mengadopsi basis akrual, dimana pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya	Pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas sedangkan aset, utang, dan ekuitas diakui dengan metode akrual.
Komponen Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan Operasional (LO) 4. Laporan Arus Kas 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Tujuan	Memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah dengan mengakui semua transaksi pada saat terjadi.	Menyajikan data mengenai realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah dengan penekanan pada aliran kas, sambil mulai mengakui aset dan kewajiban secara akrual,
Detail Pengakuan	Mengakui aset, kewajiban, pendapatan, beban, dan ekuitas secara lebih rinci sesuai dengan prinsip akrual	Fokus utama menempatkan perhatian pada kas masuk dan kas keluar, dengan pengungkapan tambahan yang terbatas pada beberapa aset dan kewajiban tertentu.
Penerapan	Diterapkan oleh entitas pemerintah yang telah mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan standar yang diterapkan.	Diterapkan oleh entitas pemerintah yang belum sepenuhnya siap untuk menerapkan basis akrual penuh, sebagai langkah transisi menuju SAP berbasis akrual.

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010

2.1.5 Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam konteks pemerintahan, kualitas laporan keuangan dinilai berdasarkan empat karakteristik utama yang tercantum dalam SAP, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Karakteristik-karakteristik ini berfungsi sebagai prasyarat normatif yang penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah mampu memenuhi tujuan pelaporan yang diharapkan.

a. Relevansi

Laporan keuangan dapat dianggap relevan jika informasi yang terkandung didalamnya mampu mempengaruhi keputusan pengguna. Hal ini dilakukan dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masalah, kondisi saat ini, atau proyeksi masa depan. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki nilai prediktif dan nilai umpan balik serta disajikan tepat waktu.

b. Andal

Andal berarti informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan bias serta dapat diandalkan untuk menggambarkan apa yang seharusnya disajikan. Informasi disebut andal apabila mencerminkan substansi transaksi yang sebenarnya, disajikan secara jujur, lengkap, dan dapat diverifikasi.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus dapat dibandingkan, baik antarperiode untuk satu entitas maupun antar entitas untuk pada periode yang sama. Komparabilitas ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi kecenderungan dan pola dalam posisi keuangan dan

kinerja dari waktu ke waktu. Untuk mencapai karakteristik ini, pemerintah harus menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten dari satu periode ke periode lain dan diantara entitas pelaporan, kecuali ada perubahan yang dibenarkan. Stadarisasi SAP mendukung tercapainya perbandingan tersebut.

d. Dapat Dipahami

Laporan keuangan pemerintah harus disajikan secara dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas pemerintahan dan akuntansi. Informasi harus disajikan secara jelas dan sistematis sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam interpretasinya. Meskipun demikian, informasi kompleks yang relevan dan andal tetap harus disampaikan, dan tidak boleh dihilangkan hanya karena sulit dipahami oleh sebagian pengguna.

2.1.6 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

SAP terdiri dari serangkaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang mengatur berbagai aspek dari akuntansi pemerintahan. Berikut adalah ringkasan dari beberapa PSAP yang paling utama menurut KSAP (2021):

a. PSAP No. 01: Penyajian Laporan Keuangan

Dokumen ini menguraikan tujuan dari laporan keuangan, tanggung jawab yang terkait dengan pelaporan serta komponen, struktur, dan isi dari laporan tersebut. Komponen laporan keuangan yang dimaksud meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Laporan Operasional
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas
- 5) Neraca
- 6) Laporan Arus Kas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

b. PSAP No. 02: Laporan Realisasi Anggaran

Memberikan kerangka dasar untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama satu periode pelaporan, dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam evaluasi pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggar

c. PSAP No. 03: Laporan Arus Kas

Dokumen ini mengatur penyajian Laporan Arus Kas, yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan. Laporan ini dikategorikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi mengenai arus kas ini sangat berharga untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta memahami kebutuhan entitas dalam pengelolaan arus kas tersebut.

d. PSAP No. 04: Catatan atas Laporan Keuangan

Menetapkan ketentuan untuk penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memberikan penjelasan naratif atau rincian dari angka angka yang terdapat dalam laporan keuangan utama. Catatan atas Laporan Keuangan juga memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan, tambahan informasi yang tidak tertera dalam laporan keuangan, serta informasi lain yang diperlukan untuk memberi gambaran yang wajar mengenai laporan keuangan.

e. PSAP No. 05: Akuntansi Persediaan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Persediaan diakui sebagai aset ketika memenuhi kriteria tertentu dan dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Standar ini memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan mencerminkan nilai ekonomis yang sesungguhnya.

f. PSAP No. 06: Akuntansi Investasi

Menetapkan perlakuan akuntansi untuk investasi yang dimiliki oleh entitas pemerintah, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Investasi diklasifikasikan berdasarkan tujuan kepemilikannya, apakah untuk diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, atau tersedia untuk dijual dan masing masing kategori tersebut memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda.

g. PSAP No. 07: Akuntansi Aset Tetap

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, termasuk dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Aset tetap diakui sebagai aset apabila memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulanan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Pengukuran awal aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan, dan selanjutnya dapat menggunakan model biaya atau revaluasi.

h. PSAP No. 08: Akuntansi Konstruksi dan Pengerjaan

Menetapkan perlakuan akuntansi untuk aset yang masih dalam tahap konstruksi atau pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan diakui sebagai aset ketika biaya yang dikeluarkan dapat diukur secara akurat dan dapat diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Setelah selesai, aset tersebut kemudian direklasifikasi menjadi aset tetap.

i. PSAP No. 09: Akuntansi Kewajiban

Mengatur perlakuan akuntansi terhadap kewajiban, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kewajiban diakui ketika entitas memiliki kewajiban saat ini yang berasal dari peristiwa masa lalu, dimana penyelesaian kewajiban tersebut diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya. Pengukuran kewajiban dilakukan berdasarkan nilai wajar atau jumlah yang disepakati.

j. PSAP No. 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Menetapkan perlakuan akuntansi untuk koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Koreksi kesalahan harus disajikan secara retrospektif, sementara perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara prospektif, kecuali ditentukan sebaliknya. Peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan.

k. PSAP No. 11: Laporan Keuangan Konsolidasian

PSAP 11 diterapkan pada entitas pemerintah yang ditunjuk sebagai entitas pelaporan, yang meliputi pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. Meskipun demikian, standar ini tidak mengatur tentang laporan keuangan konsolidasian bagi perusahaan milik negara atau daerah, investasi dalam perusahaan asosiasi, investasi dalam usaha patungan, maupun laporan statistik gabungan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas
- 6) Laporan Arus Kas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.7 Komponen Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Berikut adalah komponen laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Munandar (2015) anggaran dapat dipahami sebagai rencana sistematis yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan, dinyatakan dalam satuan moneter yang berlaku, dan dirancang untuk periode tertentu di masa depan. Dalam bukunya yang berjudul “Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, Gege Edy Prasetya (2005) menjelaskan bahwa realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait pendapatan, belanja transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, serta sisa lebih atau kurang dari pembiayaan anggaran dalam satu periode pelaporan. Secara sederhana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta surplus/defisit dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini, dilakukan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasinya, sehingga memberikan gambaran mengenai ketaatan terhadap anggaran yang telah disusun.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan beberapa unsur penting, antara lain:

- 1) Pendapatan LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;

- 4) Surplus/Defisit LRA;
- 5) Pembiayaan;
- 6) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Di dalam penjelasan tersebut akan diuraikan berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan anggaran, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta alasan-alasan yang menyebabkan perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasinya. Laporan ini juga mencakup daftar yang merincikan angka-angka yang dianggap perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Adapun PSAP No. 02 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran serta pengungkapan informasi terkait.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah bagian penting dari laporan keuangan yang menyajikan informasi secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan ini mencakup beberapa pos antara lain Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran untuk tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan dari tahun sebelumnya, serta Saldo Anggaran Lebih akhir (Hoesada, 2022).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tahun 2010, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain;
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Selain itu, entitas pelaporan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih melalui Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP 01 menyertakan ilustrasi format LPSAL dalam ilustrasi PSAP 01.E dan 01.F. Ilustrasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penerapan standar dalam pelaporan keuangan, namun tidak dianggap sebagai bagian dari standar itu sendiri. Berikut adalah contoh format LPSAL yang disesuaikan dari ilustrasi PSAP 01.E.

Tabel 2. 2 Contoh Format LPSAL

Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	(xxx)	(xxx)
Subtotal (1-2)	xxx	xxx
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berjalan	xxx	xxx
Subtotal (3+4)	xxx	xxx
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
Lain Lain	xxx	xxx
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010

Angka “xxx” adalah placeholder yang perlu digantikan dengan nilai aktual sesuai dengan data keuangan entitas. Format diatas menyajikan

informasi secara komparatif antara dua periode pelaporan yaitu Tahun 20X1 dan Tahun 20X0, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan SAL.

c. Neraca

Neraca adalah sebuah laporan yang mencerminkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan terkait aset, kewajiban, dan ekuitas, pada sebuah tanggal tertentu.

Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya menjadi dua kategori, yaitu aset lancar dan aset non lancar. Begitu pula, kewajiban dibagi menjadi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

Setiap entitas pelaporan juga diwajibkan untuk mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban memisahkan jumlah yang diperkirakan akan diterima atau dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, serta jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar lebih dari dua belas bulan.

Bagi entitas pelaporan yang menyediakan barang untuk keperluan kegiatan pemerintah, penting untuk melakukan klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi jelas terkait barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi mendatang yang akan dimanfaatkan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi mengenai tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan sangat berguna untuk menilai likuiditas serta solvabilitas entitas pelaporan.

Selain itu, informasi mengenai penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban, seperti persediaan dan cadangan, juga penting untuk memastikan klasifikasi yang tepat, apakah aset tersebut termasuk dalam kategori lancar atau non lancar, serta kewajiban yang termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang. Neraca menyajikan pos-pos berikut ini secara komparatif dengan periode sebelumnya:

- 1) Kas dan Setara Kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) Aset tetap;
- 7) Kewajiban jangka pendek;
- 8) Kewajiban jangka panjang;
- 9) Ekuitas.

Pos-pos yang tidak disebutkan dalam paragraf diatas akan disajikan dalam Neraca jika ditentukan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan atau jika penyajian tersebut diperlukan untuk mencerminkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan dengan wajar. Pertimbangan untuk menyajikan pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada beberapa faktor berikut:

- 1) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- 2) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- 3) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang memiliki fungsi dan sifat yang berbeda kadang kadang diukur dengan menggunakan dasar pengukuran yang berbeda pula. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat berdasarkan biaya perolehan, sementara kelompok lain dicatat berdasarkan nilai wajar yang diestimasikan.

Sebuah entitas pelaporan menyampaikan informasi, baik melalui Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan, mengenai subklasifikasi pos-pos yang disajikan, dengan pengelompokan yang sesuai dengan operasional entitas tersebut. Setiap pos dapat disubklasifikasikan lebih lanjut sesuai dengan karakteristiknya, jika diperlukan.

Rincian dalam subklasifikasi di Neraca atau Catatan atas Laporan Keuangan akan dipengaruhi oleh ketentuan yang diterapkan dalam SAP serta materialitas dari pos yang bersangkutan. Faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan subklasifikasi.

Pengungkapan informasi akan bervariasi menurut jenis pos, contohnya:

- 1) Piutang dapat dirinci berdasarkan jenisnya, seperti piutang pajak, retribusi, penjualan, piutang dari pihak terkait, uang muka, serta kategori lainnya. Piutang transfer juga dirinci sesuai dengan sumbernya.
- 2) Persediaan dijabarkan lebih rinci sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk persediaan.
- 3) Aset tetap dikategorikan menurut kelompok yang ditentukan oleh standar pengelolaan aset tetap.

- 4) Utang transfer dianalisis berdasarkan entitas penerimanya.
- 5) Dana cadangan diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya.
- 6) Pengungkapan mengenai kepentingan pemerintah dalam perusahaan negara atau daerah mencakup jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian, dan metode penilaian yang digunakan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi terkait sumber dan penggunaan kas serta perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi. Selain itu, laporan ini juga mencantumkan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus kas yang masuk dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitori. Penyajian Laporan Arus Kas serta pengungkapan terkait arus kas diatur dalam PSAP Nomor 03 tentang laporan arus kas.

Menurut Sari dan Dwilita (2019) dalam bukunya yang berjudul "*Financial Management*" Laporan Arus Kas dapat diartikan sebagai laporan leuangan yang menyajikan informasi mengenai aliran penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan dalam periode tertentu.

Hal serupa dikatakan pula oleh Maruta (2017) Laporan arus kas adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dalam suatu perusahaan. Aliran kas ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

e. Laporan Operasional

Menurut Sriyani *et al* (2022), Laporan operasional adalah salah satu komponen penting dalam laporan keuangan. Laporan ini menyajikan ringkasan mengenai sumber daya ekonomi yang tersedia serta peningkatan ekuitas. Selain itu, laporan ini juga mencerminkan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya tersebut untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam suatu periode tertentu.

Laporan keuangan mencakup laporan operasional yang menyajikan beberapa pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan dari kegiatan operasional;
- b) Beban yang terkait dengan kegiatan operasional;
- c) Surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, jika ada;
- d) Pos luar biasa, jika ada;
- e) Surplus atau defisit dari laporan operasional.

Penambahan pos, judul, dan subtotal akan disajikan dalam laporan operasional apabila standar ini mensyaratkannya atau jika dianggap perlu untuk menyajikan hasil operasi suatu entitas pelaporan dengan wajar.

Dalam konteks laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis berdasarkan klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penambahan item pada laporan operasional, beserta deskripsi yang digunakan dan susunan item tersebut, dapat disesuaikan jika diperlukan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai operasi yang dimaksud.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan meliputi materialitas serta sifat dan fungsi dari komponen pendapatan dan beban dalam laporan operasional.

Pemilihan metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi bergantung pada faktor faktor historis dan peraturan yang berlaku, serta karakteristik organisasi itu sendiri. Kedua metode ini dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan beban, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang mungkin berbeda dari hasil output entitas yang bersangkutan. Mengingat bahwa penerapan masing masing metode pada entitas yang berbeda memiliki keunggulan tersendiri, standar ini memungkinkan entitas pelaporan untuk memilih salah satu metode yang dianggap paling mampu menyajikan unsur operasi dengan baik.

Dalam Laporan Operasional, surplus atau defisit dari penjualan aset nonlancar serta pendapatan atau beban luar biasa diklasifikasikan dalam kelompok terpisah. PSAP No. 12 menjelaskan dengan lebih rinci mengenai Laporan Operasional, dimana beban dibagi menurut klasifikasi ekonomi. Laporan operasional juga disajikan dalam format perbandingan dengan tahun sebelumnya, berikut adalah contoh yang dapat dilihat pada ilustrasi PSAP 12. A dan 12. B.

Ilustrasi PSAP 12. A: Contoh Laporan Operasional dengan Angka Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya.

Tabel 2. 3 Tabel Laporan Operasional dengan Angka Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya
Pendapatan-LO	xxx	xxx
Beban	xxx	xxx
Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
Pos Luar Biasa	xxx	xxx
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	xxx	xxx
Surplus/Defisit Setelah Pos Luar Biasa	xxx	xxx

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010

Ilustrasi PSAP 12.B: Contoh Laporan Operasional dengan Rincian Pendapatan dan Beban.

Tabel 2. 4 Laporan Operasioanal dengan Rincian Pendapatan dan Beban

Uraian	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya
Pendapatan-LO		
-Pendapatan A	xxx	xxx
-Pendapatan B	xxx	xxx
-Pendapatan C	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan-LO	xxx	xxx
Beban		
-Beban X	xxx	xxx
-Beban Y	xxx	xxx
-Beban Z	xxx	xxx
Jumlah Beban	xxx	xxx
Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010

f. Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan jenis laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas untuk menggambarkan fluktuasi dalam aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan setidaknya beberapa pos utama, yaitu:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus atau defisit dari Laporan Operasional untuk periode yang bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang secara langsung mempengaruhi penambahan atau pengurangan ekuitas, termasuk dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kelasahan mendasar.

Contohnya meliputi:

- (a) Koreksi kesalahan mendasar terkait persediaan dari periode sebelumnya;
- (b) Perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi aset tetap.

- 4) Ekuitas Akhir.

Selain itu, entitas pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut mengenai unsur unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas melalui Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan informasi tambahan yang disertakan dibagian akhir laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan berbagai informasi sebagai berikut:

- 1) Informasi umum mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro;

- 3) Ringkasan pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, beserta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapainya;
- 4) Penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang digunakan untuk transaksi dan peristiwa penting lainnya;
- 5) Detail dan penjelasan untuk setiap pos yang disajikan pada lembar depan laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang belum tercantum dalam lembar depan laporan keuangan;
- 7) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, tetapi tidak disertakan dalam lembar depan laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasioanal, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus memiliki referensi silang dengan informasi yang relevan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan ini mencakup penjelasan, daftar terperinci, atau analisis tentang nilai suatu pos yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup penyajian informasi yang diwajibkan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan, serta pengungkapan lain

yang diperlukan untuk memberikan penyajian laporan keuangan yang wajar, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen lainnya.

Bagian kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan memaparkan beberapa hal penting, antara lain:

- 1) Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Sejauh mana kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan masa Transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diimplementasikan oleh entitas pelaporan; dan
- 3) Kebijakan akuntansi spesifik yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara mendalam.

2.1.8 Kendala Penerapan Akuntansi Keuangan Berbasis SAP dalam Penyajian Laporan Keuangan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan tak terpisahkan dari sebuah organisasi, baik itu institusi, perusahaan, maupun instansi. Keberadaan sumber daya manusia ini menjadi kunci penentu dalam perkembangan suatu perusahaan.

Dalam suatu instansi, pegawai adalah sumber daya terpenting untuk mencapai tujuan. Keberhasilan pengelolaan instansi sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia fokus pada pengelolaan manusia dibandingkan dengan sumber daya lainnya.

Menurut Babullah (2024) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu elemen penting dalam sebuah organisasi, yang mencakup semua individu yang terlibat dalam berbagai aktivitas untuk mendukung tujuan organisasi tersebut. Secara mendasar, pengertian sumber daya manusia mencakup serangkaian aktivitas serta prosedur untuk mengelola, mengatur dan merawat sumber daya manusia itu sendiri.

Manusia merupakan bagian integral yang sangat diperlukan oleh sebuah instansi atau organisasi. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat kebijakan manajemen yang kurang memperhatikan betapa krusialnya peran sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah penting. Pegawai yang memahami perangkat pendukung dalam proses ini, terutama terkait dengan aplikasi sistem akuntansi pemerintahan yang merupakan program khusus diperlukan agar mereka dapat menjalankan aplikasi tersebut dengan akurat dan tepat.

Perhatian yang lebih besar terhadap sumber daya manusia di setiap instansi, terutama dalam hal pelaporan dan penyajian laporan keuangan, menjadi sangat penting agar penerapan yang dilakukan tetap dalam koridor peraturan pemerintah yang berlaku. Untuk itu, instansi harus rutin mengadakan pelatihan bagi pegawai agar keterampilan yang dimiliki semakin terasah. Hal ini akan mendukung upaya menerapkan dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah dengan baik dan efektif.

2.2 Penelitian Terdahulu

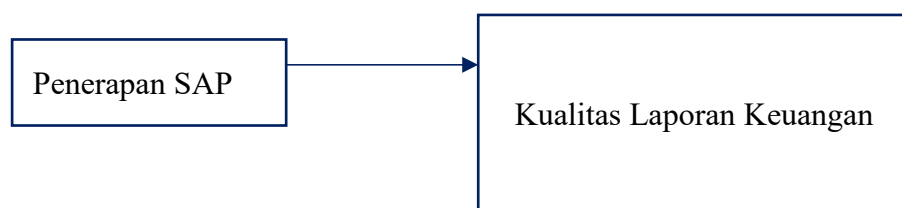
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Buleleng.	Ida Bagus Adi Gunawan dan Edy Sujana	2023	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaal, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian intern masing masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal Terhadap Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan	Sanrina Ria Simanjuntak.	2024	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal di Pemerintah Kota Medan telah berjalan baik dan efektif. Penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan efektif.
3	Pengaruh penerapan Standar	Fransiska Tirza	2023	Penelitian ini menemukan bahwa

	Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa	Lantu, Royke Pangkey, Olviane Sumampouw.		Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, Pemanfaatan teknologi informasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
4	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	Puji Afriyeni, Siti Zuliyana, Siska Asrina, dan Syaherwandi	2024	Studi ini menemukan bahwa penerapan SAP di Bappeda Kabupaten Bengkalis membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta penyajian informasi keuangan yang lebih konsisten dan transparan.
5	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dalam Penyajian Laporan Keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Di Kota Medan.	Ismi Sukmasari	2024	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI dalam penyajian laporan keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan namun masih terdapat beberapa kendala dalam

				implementasinya.
--	--	--	--	------------------

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

- H₀: Penerapan akuntansi keuangan berbasis SAP tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
- H₁: Penerapan akuntansi keuangan berbasis SAP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.